

Dinamika Minat Civitas Akademika Terhadap Pembayaran Zakat Melalui Unit Pengumpul Zakat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Moh. Abu Suhud¹, Azis Muslim^{2*}, Moh. Nazili³, Mir'atun Nur Arifah⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

⁴Universitas Islam Indonesia

*Corresponding Author E-mail: muslimtenan@gmail.com

Abstract

This study examines the dynamics of academic community interest in paying zakat through the Zakat Collection Unit (UPZ) at UIN Sunan Kalijaga. Employing a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews, observation, and document analysis, and analyzed thematically. The findings reveal that interest in paying zakat is not solely determined by individual religiosity but is shaped by the interaction of three main dimensions: psychological, institutional, and social. At the psychological level, trust and the construction of meaning toward the institution play a central role. At the institutional level, formal legitimacy, transparency, and accountability influence acceptance of UPZ. At the social level, informal communication, leadership example, and collective experiences strengthen participation. The study concludes that interest is a dynamic social process; therefore, enhancing zakat participation in higher education institutions requires institutional strategies that foster symbolic legitimacy, transparency, and a participatory communication ecosystem.

Keywords: zakat intention; institutional legitimacy; trust

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika minat civitas akademika dalam membayar zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UIN Sunan Kalijaga. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minat pembayaran zakat tidak semata ditentukan oleh religiositas individual, tetapi terbentuk melalui interaksi tiga dimensi utama: psikologis, institusional, dan sosial. Pada dimensi psikologis, trust dan konstruksi makna terhadap lembaga menjadi faktor kunci. Pada dimensi institusional, legitimasi formal, transparansi, dan akuntabilitas memengaruhi tingkat penerimaan terhadap UPZ. Sementara itu, pada dimensi sosial, komunikasi informal, keteladanan pimpinan, dan pengalaman kolektif memperkuat partisipasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minat merupakan proses sosial yang dinamis, sehingga penguatan partisipasi zakat di kampus memerlukan strategi institusional yang membangun legitimasi simbolik, transparansi, serta ekosistem komunikasi partisipatif.

Kata Kunci: minat zakat, legitimasi institusional, Kepercayaan

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan instrumen distribusi kesejahteraan dalam ekonomi Islam yang memiliki dimensi teologis sekaligus sosial-ekonomi. Dalam kerangka maqāsid al-syarī'ah, zakat berfungsi menjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan memperkuat keadilan sosial melalui mekanisme redistribusi (Chapra, 2000; Kahf, 1999). Di Indonesia, tata kelola zakat telah mengalami institusionalisasi melalui pembentukan BAZNAS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011, dan pengembangan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memperluas jangkauan

penghimpunan. Dalam struktur tersebut, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menjadi perpanjangan tangan lembaga zakat resmi di berbagai instansi, termasuk perguruan tinggi.

Secara nasional, potensi zakat Indonesia diperkirakan sangat besar, namun realisasi penghimpunannya masih berada di bawah estimasi potensi (BAZNAS, 2023). Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menunjukkan bahwa persoalan zakat bukan semata-mata terletak pada kewajiban normatif, melainkan pada faktor perilaku, kepercayaan, tata kelola, dan desain kelembagaan. Dalam konteks ini, lembaga pendidikan tinggi Islam memiliki posisi strategis karena menggabungkan otoritas moral, legitimasi akademik, dan struktur birokrasi formal yang memungkinkan integrasi sistem penghimpunan zakat secara sistematis.

Perguruan tinggi Islam negeri seperti UIN Sunan Kalijaga memiliki karakteristik unik sebagai komunitas religius sekaligus rasional. Civitas akademika yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara normatif memiliki tingkat literasi agama dan kesadaran normatif yang relatif tinggi. Dalam perspektif teori institusional (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2014), organisasi seperti perguruan tinggi membentuk norma dan praktik yang dapat mempengaruhi perilaku anggotanya melalui mekanisme regulatif, normatif, dan kultural-kognitif. Oleh karena itu, perilaku pembayaran zakat melalui UPZ kampus tidak dapat dipahami semata sebagai keputusan individual, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara struktur kelembagaan dan preferensi personal.

Sebagian besar penelitian mengenai perilaku pembayaran zakat selama ini menggunakan pendekatan psikologis individual seperti Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), religiosity model, dan trust-based model. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, dan perceived behavioral control berpengaruh signifikan terhadap niat membayar zakat (Huda et al., 2017; Saad & Haniffa, 2014). Faktor kepercayaan terhadap lembaga zakat juga terbukti menjadi determinan utama dalam meningkatkan intensi dan loyalitas muzakki (Mukhlis & Beik, 2013; Kasri & Yuniar, 2021). Namun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya dilakukan pada masyarakat umum atau pengguna platform zakat digital, bukan pada komunitas akademik yang memiliki struktur sosial dan birokrasi khas.

Di sisi lain, kajian tentang UPZ lebih banyak berfokus pada instansi pemerintah atau perusahaan BUMN, sementara penelitian mengenai UPZ di perguruan tinggi Islam negeri relatif terbatas. Padahal, dalam konteks kampus, terdapat variabel-variabel khas seperti kepemimpinan rektorat, kebijakan pemotongan payroll, budaya organisasi akademik, dan legitimasi moral institusi yang berpotensi mempengaruhi minat pembayaran zakat. Ketiadaan

integrasi antara teori perilaku individu dan teori institusional dalam menjelaskan fenomena ini menunjukkan adanya kekosongan konseptual dalam literatur zakat.

Lebih lanjut, sebagian besar studi zakat bersifat cross-sectional dan menekankan hubungan korelasional sederhana. Penelitian mengenai dinamika minat yang mempertimbangkan perubahan kebijakan, inovasi digital, transparansi laporan keuangan, dan strategi komunikasi kelembagaan masih terbatas. Dalam era digitalisasi tata kelola zakat, faktor kemudahan transaksi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi menjadi semakin penting dalam membentuk kepercayaan publik (Kasri, 2013; Hassan & Noor, 2015). Dalam konteks kampus, transparansi pelaporan dan komunikasi internal dapat berperan signifikan dalam membentuk norma kolektif partisipasi zakat.

Selain itu, terdapat dimensi sosiologis yang belum banyak disentuh, yakni bagaimana identitas sebagai akademisi mempengaruhi praktik keagamaan finansial. Akademisi cenderung memiliki orientasi rasional, kritis, dan berbasis bukti (evidence-based). Oleh karena itu, pendekatan normatif yang semata mengandalkan imbauan moral mungkin kurang efektif tanpa didukung oleh transparansi data, akuntabilitas kelembagaan, dan narasi dampak sosial yang terukur. Perspektif ini memperlihatkan bahwa minat pembayaran zakat di lingkungan kampus merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan faktor psikologis, struktural, dan kultural secara simultan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai dinamika minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ di UIN Sunan Kalijaga menjadi relevan dan signifikan. Penelitian ini diharapkan tidak hanya berkontribusi dalam pengembangan teoretik perilaku zakat berbasis institusi pendidikan tinggi, tetapi juga memberikan rekomendasi strategis berbasis bukti dalam optimalisasi penghimpunan zakat di lingkungan perguruan tinggi Islam.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kajian tentang zakat dalam konteks kelembagaan modern di Indonesia berkembang pesat sejak penguatan peran BAZNAS sebagai otoritas resmi pengelola zakat nasional. Sejumlah penelitian menempatkan zakat sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan kesejahteraan. Studi-studi tersebut umumnya menyoroti aspek tata kelola (governance), akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas distribusi zakat dalam mendorong pembangunan sosial-ekonomi (Beik & Arsyianti, 2016; Ascarya, 2018). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa performa kelembagaan dan kepercayaan publik menjadi faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan zakat.

Dalam ranah perilaku muzaki, banyak penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengadopsi kerangka Theory of Planned Behavior (TPB) yang diperkenalkan oleh Icek Ajzen (1991). Model ini menekankan peran sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku persepsian dalam membentuk niat berperilaku. Beberapa studi zakat di Indonesia dan Malaysia menemukan bahwa religiositas, kepercayaan terhadap lembaga, dan persepsi kemudahan layanan berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat melalui lembaga resmi (Alam et al., 2012; Saad & Haniffa, 2014; Kasri & Yuniar, 2015). Meskipun kuat secara statistik, pendekatan ini cenderung melihat minat sebagai variabel psikologis individual dan kurang mengeksplorasi konteks sosial serta dinamika institusional yang melingkupinya.

Selain pendekatan perilaku, terdapat pula kajian yang menyoroti dimensi kepercayaan (trust) dan legitimasi kelembagaan dalam filantropi Islam. Dalam perspektif teori institusional, legitimasi dipahami sebagai persepsi bahwa tindakan suatu entitas sesuai dengan norma dan nilai sosial yang berlaku (Suchman, 1995). Dalam konteks zakat, legitimasi lembaga sangat menentukan tingkat partisipasi muzaki. Studi tentang kepercayaan terhadap lembaga zakat menunjukkan bahwa transparansi laporan, akuntabilitas, dan kedekatan emosional dengan pengelola memengaruhi keputusan muzaki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal (Huda et al., 2017).

Sementara itu, penelitian tentang UPZ di lingkungan lembaga pendidikan tinggi, termasuk di kampus Islam seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, relatif masih terbatas. Sebagian besar studi bersifat deskriptif-administratif, membahas struktur organisasi, regulasi, dan capaian penghimpunan dana. Belum banyak penelitian yang memposisikan kampus sebagai ruang sosial yang khas, di mana identitas keagamaan, rasionalitas akademik, dan budaya birokrasi saling berinteraksi dalam membentuk praktik filantropi. Padahal, sebagai institusi pendidikan tinggi Islam, kampus memiliki potensi besar sebagai laboratorium sosial bagi penguatan zakat berbasis institusi.

Di sisi lain, literatur tentang filantropi Islam kontemporer menunjukkan pergeseran dari praktik karitatif tradisional menuju model yang lebih profesional dan terlembaga (Latief, 2013). Transformasi ini menuntut adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai relasi antara individu, institusi, dan nilai-nilai keagamaan dalam praktik zakat. Namun, integrasi antara perspektif perilaku, teori institusional, dan konteks spesifik kampus sebagai arena sosial belum banyak dilakukan secara simultan.

Berdasarkan telaah tersebut, terdapat beberapa celah penelitian. Pertama, dominasi pendekatan kuantitatif yang menempatkan minat sebagai variabel terukur, tanpa menggali

proses konstruksi makna dan negosiasi sosial yang melatarbelakanginya. Kedua, minimnya kajian yang memfokuskan pada UPZ berbasis kampus sebagai arena interaksi antara religiositas personal dan legitimasi kelembagaan. Ketiga, belum adanya model konseptual yang secara integratif menghubungkan dimensi psikologis, institusional, dan sosial dalam memahami minat pembayaran zakat di lingkungan pendidikan tinggi Islam.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam bagaimana minat civitas akademika dalam membayar zakat melalui UPZ di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbentuk dan berkembang. Penelitian ini tidak berfokus pada pengukuran angka atau generalisasi statistik, melainkan pada penggalian makna, pengalaman, dan pertimbangan yang melatarbelakangi pilihan individu dalam menunaikan zakat melalui lembaga kampus.

Subjek penelitian meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan pengelola UPZ yang dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan dan relevansinya dengan fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi terhadap aktivitas UPZ, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali pengalaman dan pandangan informan secara langsung, sementara observasi dan dokumentasi berfungsi untuk memperkuat serta memverifikasi informasi yang diperoleh. Data yang terkumpul dianalisis secara tematik melalui proses membaca, mengelompokkan, dan menafsirkan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta mengonfirmasi beberapa temuan penting kepada informan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Selayang Pandang UPZ UIN Sunan Kalijaga

Kehadiran UPZ di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari perkembangan tata kelola zakat nasional pasca penguatan peran BAZNAS sebagai otoritas resmi pengelola zakat di Indonesia. Pembentukan UPZ di kampus pada dasarnya merupakan respons institusional terhadap kebutuhan menghadirkan mekanisme pengelolaan zakat yang lebih terstruktur, akuntabel, dan terintegrasi dengan sistem nasional. Di satu sisi, kampus sebagai institusi Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memfasilitasi pelaksanaan kewajiban zakat bagi civitas akademika; di sisi lain, regulasi nasional mendorong pengumpulan zakat melalui lembaga resmi agar distribusinya lebih terkoordinasi.

Secara historis, pembentukan UPZ di UIN Sunan Kalijaga bermula dari kesadaran bahwa potensi zakat dari dosen dan tenaga kependidikan cukup signifikan, tetapi belum

terkelola secara optimal. Sebelum UPZ berdiri secara formal, praktik pembayaran zakat dikelola oleh UIN Suka Charity. Namun, praktek ini dianggap illegal karena tidak memiliki payung hukum. Karena itu, Pembayaran zakat yang dikelola secara kelembagaan di UIN Sunan Kalijaga sempat terhenti, dan muzakki menyalurkan zakatnya secara individual kepada mustahik atau melalui lembaga eksternal di luar kampus. Situasi ini menimbulkan kesenjangan antara potensi ekonomi yang besar dan dampak sosial yang belum terorganisasi. Melihat kondisi ini, Yudian Wahyudi sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga membentuk UPZ UIN Sunan Kalijaga sebagai instrumen kelembagaan yang berupaya menjembatani potensi tersebut dengan kebutuhan sosial di sekitar kampus.

Dalam struktur organisasi, UPZ berada di bawah koordinasi BAZNAS dan secara administratif terhubung dengan struktur manajerial universitas. Posisi ini menempatkan UPZ UIN Sunan Kalijaga dalam ruang ganda, yaitu sebagai bagian dari sistem zakat nasional sekaligus sebagai unit internal kampus. Relasi dengan BAZNAS memberikan legitimasi regulatif, baik dalam aspek pengelolaan dana, pelaporan, maupun standar akuntabilitas. Sementara itu, keterikatan dengan struktur universitas memberikan legitimasi kultural sebagai representasi nilai keislaman kampus.

Namun posisi ganda ini juga menghadirkan tantangan. Di satu sisi, UPZ dituntut mengikuti standar profesionalisme dan pelaporan yang ketat. Di sisi lain, UPZ harus membangun kedekatan simbolik dengan civitas akademika agar tidak dipersepsikan sekadar sebagai kepanjangan birokrasi. Struktur organisasi yang terdiri dari pengurus harian, bagian pengumpulan, pendistribusian, dan administrasi menunjukkan upaya profesionalisasi tata kelola. Akan tetapi, efektivitas struktur tersebut sangat bergantung pada kapasitas komunikasi dan dukungan kebijakan internal kampus.

Kebijakan formal universitas terkait zakat hadir dalam bentuk surat edaran atau regulasi yang mendorong civitas akademika untuk menyalurkan zakat melalui UPZ, belum ada regulasi yang mewajibkan. Selain itu, kampus memfasilitasi sistem pemotongan gaji sukarela (auto-debet) sebagai bentuk kemudahan pembayaran. Kebijakan ini memperlihatkan adanya legitimasi regulatif yang cukup kuat. Namun demikian, kebijakan formal tidak selalu otomatis menghasilkan partisipasi luas, karena penerimaan terhadap kebijakan tersebut tetap bergantung pada persepsi individu dan dinamika sosial yang berkembang di lingkungan kampus.

Dengan demikian, secara institusional UPZ UIN Sunan Kalijaga memiliki dasar legal dan struktural yang relatif kokoh. UPZ berdiri pada persilangan antara mandat nasional pengelolaan zakat dan komitmen moral universitas Islam. Akan tetapi, kekuatan formal

tersebut belum tentu identik dengan penerimaan simbolik dan emosional di tingkat civitas akademika.

2. Dimensi Psikologis dalam Pembentukan Minat Pembayaran Zakat melalui UPZ

Dimensi psikologis memainkan peran yang kompleks dalam membentuk minat civitas akademika untuk membayar zakat melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di UIN Sunan Kalijaga. Meskipun hampir seluruh informan memiliki kesadaran normatif yang kuat mengenai kewajiban zakat sebagai perintah agama, pemaknaan terhadap praktik penyalurannya menunjukkan variasi yang signifikan. Bagi sebagian informan, zakat dipahami sebagai instrumen teologis sekaligus sosial-ekonomi. Mereka memaknai zakat bukan hanya sebagai kewajiban individual, tetapi sebagai mekanisme kolektif yang idealnya dikelola secara profesional dan terstruktur agar mampu memberikan dampak sosial yang lebih luas. Dalam perspektif ini, keberadaan UPZ dipandang sebagai perpanjangan dari misi keislaman institusi, sehingga pembayaran zakat melalui lembaga kampus dianggap selaras dengan integrasi nilai agama dan tata kelola modern.

Namun demikian, terdapat pula informan yang memaknai zakat dalam kerangka relasi personal antara muzakki dan mustahik. Bagi kelompok ini, pengalaman spiritual dalam memberikan zakat secara langsung memiliki nilai emosional dan simbolik yang tidak sepenuhnya dapat digantikan oleh mekanisme kelembagaan. Mereka tetap meyakini kewajiban zakat, tetapi tidak secara otomatis menjadikan UPZ sebagai pilihan utama penyaluran. Perbedaan orientasi makna ini menunjukkan bahwa minat terhadap UPZ tidak hanya ditentukan oleh tingkat religiositas, melainkan oleh bagaimana individu mengkonstruksi hubungan antara ibadah dan institusi.

Sikap terhadap UPZ sebagai lembaga juga memperlihatkan dinamika yang khas dalam lingkungan akademik. Secara umum, tidak ditemukan penolakan normatif terhadap keberadaan UPZ UIN Sunan Kalijaga. Akan tetapi, penerimaan terhadapnya tidak bersifat *taken for granted*. Budaya akademik yang rasional dan evaluatif mendorong civitas akademika untuk menilai UPZ melalui standar profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Beberapa informan menekankan pentingnya laporan distribusi yang jelas, dokumentasi dampak sosial, dan sistem pengelolaan yang terukur. Dalam konteks ini, sikap positif terhadap zakat tidak selalu berbanding lurus dengan sikap positif terhadap lembaga pengelolanya.

Di antara berbagai faktor psikologis yang muncul, kepercayaan (*trust*) menjadi tema yang paling dominan. Kepercayaan terhadap UPZ dibangun melalui dua mekanisme utama. Pertama, kepercayaan interpersonal yang lahir dari kedekatan atau pengenalan langsung

terhadap pengelola. Kedua, kepercayaan institusional yang bersumber dari persepsi terhadap sistem tata kelola, transparansi laporan, dan legitimasi struktural lembaga. Menariknya, pada kelompok dosen, kepercayaan institusional cenderung lebih menentukan dibandingkan kedekatan personal. Hal ini mencerminkan kecenderungan akademisi untuk menilai lembaga berdasarkan sistem dan bukti, bukan semata hubungan sosial. Sebaliknya, pada sebagian tenaga kependidikan, faktor kedekatan personal dengan pengelola memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam membangun rasa aman dan keyakinan.

Norma sosial dalam lingkungan kampus ternyata tidak berfungsi sebagai tekanan kolektif yang kuat. Keputusan membayar zakat melalui UPZ lebih sering dipandang sebagai pilihan personal daripada kewajiban sosial yang diawasi komunitas. Meskipun demikian, dukungan atau imbauan dari pimpinan universitas tetap memiliki signifikansi simbolik. Surat edaran atau ajakan resmi dipersepsi sebagai legitimasi moral institusi, meskipun tidak selalu secara langsung mengubah perilaku. Dengan demikian, norma dalam konteks kampus bersifat struktural, datang dari otoritas formal, bukan dari tekanan horizontal antar kolega.

Selain faktor sikap dan kepercayaan, persepsi terhadap kemudahan mekanisme pembayaran juga mempengaruhi minat secara signifikan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa keputusan untuk membayar zakat melalui UPZ sangat dipengaruhi oleh kemudahan prosedur, kejelasan informasi teknis, dan ketersediaan sistem pembayaran yang praktis. Mekanisme seperti potong gaji otomatis dipandang dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan konsistensi partisipasi. Sebaliknya, kurangnya sosialisasi prosedur atau sistem yang dianggap kurang efisien dapat menunda realisasi niat.

Temuan penting lainnya adalah adanya kesenjangan antara niat dan perilaku aktual. Sejumlah informan menyatakan memiliki kecenderungan positif terhadap UPZ, tetapi belum merealisasikan pembayaran zakat melalui lembaga tersebut secara konsisten. Alasan yang muncul bervariasi, mulai dari preferensi terhadap lembaga zakat lain, kebiasaan memberi langsung kepada mustahik, hingga kebutuhan akan informasi tambahan mengenai dampak distribusi dana. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa minat bukanlah kondisi statis, melainkan proses yang berkembang melalui pengalaman, interaksi, dan evaluasi berulang.

3. Dimensi Institusional dalam Pembentukan Minat Pembayaran Zakat melalui UPZ

Minat civitas akademika dalam membayar zakat melalui UPZ tidak dapat dilepaskan dari konteks institusional yang membingkainya. Di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, UPZ hadir bukan hanya sebagai lembaga pengelola dana keagamaan, tetapi sebagai bagian dari struktur birokrasi kampus yang memiliki legitimasi formal sekaligus tanggung jawab moral. Dimensi institusional ini membentuk cara civitas akademika memahami, menilai, dan

merespons keberadaan UPZ. Salah satu temuan utama berkaitan dengan peran kebijakan dan kepemimpinan kampus. Secara formal, dukungan terhadap UPZ dinyatakan melalui berbagai imbauan pimpinan universitas. Kebijakan tersebut memberikan legitimasi simbolik bahwa pembayaran zakat melalui UPZ merupakan praktik yang selaras dengan nilai dan visi institusi. Namun demikian, sebagian informan menilai bahwa kebijakan tersebut masih bersifat persuasif, belum mencapai tingkat regulatif yang kuat. Tidak adanya mekanisme otomatis seperti potong gaji default membuat partisipasi tetap bergantung pada inisiatif individual. Dalam konteks ini, kebijakan formal berfungsi sebagai penanda moral, tetapi belum sepenuhnya menjadi instrumen struktural yang mendorong partisipasi sistematis.

Selain aspek kebijakan, budaya organisasi akademik muncul sebagai faktor institusional yang signifikan. Lingkungan kampus dicirikan oleh rasionalitas kritis dan tradisi evaluatif. Civitas akademika terbiasa menilai program atau kebijakan berdasarkan argumentasi, bukti empiris, dan transparansi data. Budaya ini turut memengaruhi cara UPZ dipersepsi. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka membutuhkan bukti konkret mengenai dampak sosial dana zakat sebelum memutuskan untuk berpartisipasi secara konsisten. Dalam konteks ini, legitimasi UPZ tidak hanya dibangun melalui otoritas formal, tetapi melalui kemampuan menunjukkan akuntabilitas dan dampak yang terukur.

Dimensi transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang berulang dalam wawancara. Informan mengaitkan kepercayaan mereka terhadap UPZ dengan keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan distribusi dana. Laporan keuangan yang jelas, publikasi penerima manfaat, dan narasi dampak sosial dipandang sebagai elemen penting dalam membangun legitimasi kelembagaan. Tanpa komunikasi yang memadai, sebagian civitas akademika merasa sulit untuk mengintegrasikan UPZ ke dalam praktik keagamaan mereka. Dengan kata lain, transparansi bukan hanya persoalan administratif, melainkan bagian dari konstruksi kepercayaan institusional.

Temuan juga menunjukkan bahwa relasi UPZ dengan BAZNAS memberikan dimensi legitimasi tambahan. Keterkaitan dengan lembaga zakat nasional dipersepsi sebagai jaminan kepatuhan terhadap regulasi dan standar tata kelola. Namun demikian, legitimasi eksternal tersebut tetap perlu diperkuat oleh praktik internal yang konsisten dan komunikatif. Civitas akademika tidak hanya mempertimbangkan status formal UPZ sebagai bagian dari jaringan nasional, tetapi juga menilai performa aktualnya dalam konteks kampus.

Aspek lain yang mengemuka adalah sistem pembayaran dan infrastruktur administratif. Beberapa informan menilai bahwa efektivitas kelembagaan sangat dipengaruhi oleh kemudahan akses dan integrasi sistem. Ketika mekanisme pembayaran dirasakan sederhana

dan terintegrasi dengan sistem kepegawaian, partisipasi cenderung meningkat. Sebaliknya, prosedur yang kurang tersosialisasi atau tidak terdigitalisasi dapat mengurangi intensi meskipun kesadaran normatif sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa struktur teknis merupakan bagian integral dari dimensi institusional yang memengaruhi perilaku.

Lebih jauh, terdapat kesadaran bahwa UPZ beroperasi dalam ruang simbolik yang lebih luas, yaitu identitas kampus sebagai perguruan tinggi Islam. Sebagian informan mengaitkan partisipasi dalam UPZ dengan kontribusi terhadap reputasi moral institusi. Membayar zakat melalui lembaga kampus dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap misi sosial universitas. Namun persepsi ini tidak sepenuhnya merata, sebagian lainnya tetap memisahkan antara identitas institusional dan praktik ibadah personal. Variasi ini menunjukkan bahwa integrasi antara nilai religius dan struktur organisasi masih berada dalam proses negosiasi sosial.

Secara keseluruhan, dimensi institusional memperlihatkan bahwa minat pembayaran zakat melalui UPZ dibentuk oleh interaksi antara legitimasi formal, budaya akademik, transparansi tata kelola, dan desain sistem administratif. UPZ tidak hanya dinilai sebagai lembaga pengelola dana, tetapi sebagai entitas organisasi yang harus memenuhi standar rasionalitas dan akuntabilitas khas lingkungan akademik. Dalam konteks ini, kekuatan institusional bukan semata terletak pada keberadaan regulasi, melainkan pada kemampuannya membangun legitimasi yang diinternalisasi oleh civitas akademika.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam ekosistem perguruan tinggi Islam, dinamika minat terhadap pembayaran zakat melalui UPZ tidak dapat dipisahkan dari kualitas tata kelola dan budaya organisasi. Institusi bukan sekadar wadah, tetapi aktor yang secara aktif membentuk preferensi dan keputusan anggotanya. Dengan demikian, dimensi institusional menjadi fondasi penting dalam memahami mengapa minat terhadap UPZ dapat menguat, melemah, atau bertransformasi seiring perubahan kebijakan dan praktik kelembagaan.

4. Dimensi Interaksi dan Dinamika: Minat sebagai Proses Sosial yang Hidup

Minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ tidak lahir dari ruang hampa. Minat terbentuk melalui proses interaksi sosial yang terus bergerak, dinegosiasikan, dan diproduksi dalam percakapan sehari-hari di lingkungan kampus. Minat, dalam konteks ini, bukan sekadar keputusan individual berbasis pertimbangan rasional, melainkan hasil dari dinamika komunikasi, relasi sosial, dan pengalaman kolektif yang saling mempengaruhi. Sebagian besar informan mengaku mengetahui keberadaan UPZ bukan pertama-tama melalui dokumen resmi atau kebijakan tertulis kampus, tetapi melalui percakapan informal. Informasi tentang UPZ sering muncul dalam grup WhatsApp fakultas, obrolan santai antar dosen, atau

penjelasan singkat dalam forum rapat. Pola ini memperlihatkan bahwa arus komunikasi horizontal memiliki peran yang signifikan dalam membentuk kesadaran kolektif mengenai UPZ. Sosialisasi formal memang dilakukan, tetapi dampaknya cenderung lebih kuat ketika diperkuat oleh percakapan interpersonal yang bersifat dialogis dan persuasif.

Dalam banyak kasus, minat untuk menyalurkan zakat melalui UPZ baru muncul setelah terjadi komunikasi yang lebih personal dan argumentatif. Informan menyebut bahwa ketika mereka mendapatkan penjelasan rinci tentang program pendistribusian, mekanisme transparansi, dan kemudahan sistem pembayaran, persepsi mereka terhadap UPZ berubah secara gradual. Dari sekadar lembaga administratif, UPZ mulai dipahami sebagai instrumen distribusi sosial yang memiliki dampak nyata. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang bersifat dua arah, yang membuka ruang klarifikasi dan pertanyaan, jauh lebih efektif dibandingkan penyampaian informasi satu arah.

Lingkungan sosial di unit kerja masing-masing juga mempengaruhi dinamika minat. Pada unit yang memiliki budaya kolektif kuat dan kepemimpinan yang aktif mendukung UPZ, partisipasi cenderung lebih tinggi. Ketika pimpinan fakultas atau kepala unit secara terbuka menyatakan komitmennya dan bahkan memberi contoh langsung dalam pembayaran zakat melalui UPZ, tindakan tersebut membentuk legitimasi sosial. Dalam situasi seperti ini, minat individu tidak hanya didorong oleh kesadaran religius pribadi, tetapi juga oleh norma kolektif yang berkembang dalam komunitas kerja. Sebaliknya, pada unit yang jarang membicarakan isu zakat atau tidak memiliki figur pendorong yang kuat, minat terhadap UPZ cenderung bersifat individual dan sporadis. Tidak adanya percakapan kolektif membuat keputusan pembayaran zakat lebih dipengaruhi oleh kebiasaan lama atau preferensi pribadi. Dengan demikian, minat tampak sangat bergantung pada kualitas ekosistem sosial di mana civitas akademika berada.

Temuan lain yang menarik adalah peran pengalaman kolektif dalam memperkuat keterikatan terhadap UPZ. Informan yang pernah terlibat langsung dalam program distribusi zakat, misalnya dalam kegiatan penyaluran bantuan kepada mahasiswa kurang mampu atau masyarakat sekitar kampus, menunjukkan komitmen yang lebih konsisten. Keterlibatan tersebut menciptakan pengalaman emosional yang menghubungkan kewajiban zakat dengan realitas sosial yang konkret. Zakat tidak lagi dipahami sebagai angka yang terpotong dari gaji, melainkan sebagai jembatan solidaritas yang dapat disaksikan secara langsung dampaknya. Sebaliknya, mereka yang belum pernah terlibat atau menyaksikan secara langsung program UPZ cenderung memandang zakat sebagai kewajiban administratif. Hubungan mereka dengan UPZ terasa lebih berjarak dan kurang emosional. Perbedaan ini

memperlihatkan bahwa pengalaman kolektif memiliki daya transformasi yang signifikan dalam membangun loyalitas dan kepercayaan.

Dinamika interaksi juga terlihat dalam proses pembentukan kepercayaan. Informasi mengenai laporan keuangan dan program UPZ tidak selalu diakses melalui kanal resmi, tetapi seringkali beredar melalui diskusi informal. Ketika informasi tersebut dikomunikasikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, tingkat kepercayaan meningkat. Namun, ketika komunikasi kurang transparan atau jarang diperbarui, muncul ruang spekulasi yang dapat menghambat pertumbuhan minat. Kepercayaan, dengan demikian, bersifat sosial dan interaktif, kepercayaan tumbuh dalam ruang percakapan yang terbuka dan partisipatif.

Penelitian ini juga menemukan adanya dinamika generasional dalam pola interaksi dengan UPZ. Kelompok dosen senior umumnya memiliki kebiasaan pembayaran zakat yang telah mapan, sering kali melalui jaringan personal atau lembaga eksternal yang telah lama mereka percaya. Sementara itu, generasi yang lebih muda menunjukkan keterbukaan terhadap sistem digital, auto-debet, dan kampanye berbasis media sosial. Perbedaan ini memperlihatkan bahwa dinamika minat dipengaruhi oleh perubahan cara berinteraksi dan mengakses informasi.

Simpulan temuan pada dimensi ini menegaskan bahwa minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ adalah fenomena yang hidup dan terus berubah. Minat dipengaruhi oleh intensitas komunikasi, kualitas kepemimpinan, pengalaman kolektif, dan jaringan sosial yang membingkai interaksi sehari-hari di kampus. Minat bukan sekadar hasil dari kewajiban normatif, tetapi merupakan produk dari relasi sosial yang terus dinegosiasikan. Oleh karena itu, penguatan minat tidak cukup dilakukan melalui regulasi atau sistem administrasi semata, melainkan memerlukan strategi komunikasi yang partisipatif dan penciptaan pengalaman kolektif yang bermakna.

E. PEMBAHASAN

1. Perilaku Individual sebagai Proses Makna

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ tidak dapat direduksi sebagai variabel psikologis individual semata. Dalam tradisi studi perilaku, minat (intention) sering dijelaskan melalui kerangka Theory of Planned Behavior yang dikembangkan oleh Icek Ajzen (1991). Dalam model tersebut, minat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kerangka ini sangat berpengaruh dalam berbagai studi perilaku filantropi dan zakat, termasuk dalam konteks lembaga formal. Akan tetapi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut bekerja dalam ruang sosial yang lebih kompleks daripada yang diasumsikan

model rasional-psikologis. Minat terhadap UPZ bukan hanya hasil kalkulasi kognitif mengenai manfaat atau kewajiban agama, tetapi merupakan produk dari proses pemaknaan sosial. Dalam perspektif interaksionisme simbolik yang dirumuskan oleh Herbert Blumer (1969), tindakan sosial lahir dari makna yang dikonstruksi melalui interaksi. Individu bertindak bukan semata karena norma eksternal, tetapi karena mereka menafsirkan situasi sosial tertentu sebagai bermakna.

Dalam konteks ini, keputusan untuk membayar zakat melalui UPZ tidak hanya berkaitan dengan “apakah saya wajib membayar zakat?”, tetapi juga “apa arti membayar zakat melalui lembaga kampus bagi identitas religius dan sosial saya?” Temuan menunjukkan bahwa sebagian informan dengan tingkat religiositas tinggi tidak otomatis memilih UPZ sebagai saluran pembayaran zakat. Mereka tetap menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik atau melalui lembaga eksternal yang telah lama mereka percayai. Fenomena ini menegaskan bahwa religiositas normatif tidak selalu berbanding lurus dengan partisipasi kelembagaan.

Dalam literatur zakat, hubungan antara religiositas dan kepatuhan membayar zakat memang sering ditemukan signifikan (misalnya Beik & Arsyianti, 2016; Mukhlis & Beik, 2013). Namun penelitian ini memperlihatkan diferensiasi antara kesadaran kewajiban dan preferensi institusional. Artinya, religiositas mendorong kesadaran membayar zakat, tetapi pilihan kanal distribusi dipengaruhi oleh persepsi legitimasi lembaga. Dengan kata lain, terdapat lapisan makna tambahan yang menghubungkan nilai religius dengan kepercayaan terhadap institusi.

Di sinilah peran trust menjadi sentral. Dalam teori sosiologi modern, kepercayaan dipahami sebagai mekanisme pengurang kompleksitas sosial sebagaimana dijelaskan oleh Niklas Luhmann (1979). Individu mempercayai lembaga ketika mereka meyakini bahwa sistem tersebut memiliki kapasitas, integritas, dan konsistensi dalam menjalankan fungsi sosialnya. Sementara itu, Anthony Giddens (1990) menekankan bahwa trust dalam masyarakat modern bertumpu pada sistem abstrak yang dilegitimasi melalui mekanisme transparansi dan profesionalisme. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa trust terhadap UPZ dibangun melalui pengalaman interaksi, transparansi laporan, dan narasi dampak program. Ketika laporan distribusi zakat disampaikan secara terbuka dan dapat diverifikasi, legitimasi meningkat dan minat ikut menguat. Sebaliknya, ketika informasi kurang tersosialisasi, muncul jarak emosional yang menghambat partisipasi. Trust dalam konteks ini bukan sekadar sikap psikologis individual, melainkan konstruk sosial yang lahir dari pengakuan kolektif terhadap integritas institusi.

Secara teoretik, temuan ini memperluas pemahaman tentang Theory of Planned Behavior ke arah interpretatif. Jika dalam TPB minat diposisikan sebagai fungsi dari variabel-variabel psikologis yang dapat diukur secara kuantitatif, maka penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tersebut bekerja dalam ruang simbolik yang dibentuk oleh makna sosial. Sikap terhadap UPZ, misalnya, tidak hanya dipengaruhi oleh evaluasi rasional tentang efektivitas lembaga, tetapi juga oleh persepsi identitas, legitimasi moral, dan kedekatan simbolik dengan nilai-nilai kampus Islam.

Dengan demikian, perilaku pembayaran zakat melalui UPZ dapat dipahami sebagai tindakan sosial yang sarat makna, bukan sekadar respons terhadap norma subjektif atau persepsi kontrol perilaku. Kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan perluasan model TPB dengan memasukkan dimensi interpretatif, yakni bahwa intention terbentuk melalui proses konstruksi makna sosial yang dimediasi oleh legitimasi institusional dan trust kolektif. Dalam konteks kampus Islam seperti UIN, dimensi makna ini menjadi semakin penting karena zakat tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban ekonomi, tetapi juga sebagai simbol komitmen moral institusi terhadap keadilan sosial. Oleh karena itu, penguatan partisipasi zakat melalui UPZ tidak cukup dilakukan dengan pendekatan normatif atau administratif, tetapi memerlukan strategi yang mampu membangun makna kolektif dan legitimasi simbolik.

2. Institusi sebagai Arena Legitimasi dan Struktur Kepercayaan

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ tidak hanya ditentukan oleh faktor individual, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana UPZ diposisikan dan dilegitimasi secara institusional di lingkungan kampus. Dengan demikian, institusi bukan sekadar wadah administratif, melainkan arena tempat legitimasi, norma, dan struktur kepercayaan diproduksi dan dinegosiasikan. Dalam perspektif teori legitimasi organisasi yang dirumuskan oleh Suchman (1995), legitimasi dipahami sebagai persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas dianggap tepat, pantas, dan sesuai dalam sistem norma, nilai, dan keyakinan yang berlaku secara sosial. Legitimasi bukan sifat inheren lembaga, melainkan hasil konstruksi sosial yang terus menerus diperbarui melalui interaksi dan komunikasi publik.

Dalam konteks UPZ kampus, legitimasi tidak otomatis terbentuk hanya karena keberadaannya di bawah struktur formal universitas atau karena afiliasinya dengan BAZNAS. Temuan lapangan menunjukkan bahwa sebagian civitas akademika masih memandang UPZ sebagai unit administratif tambahan, bukan sebagai representasi nilai keagamaan institusi. Artinya, legitimasi formal belum sepenuhnya bertransformasi menjadi legitimasi moral dan kognitif. Kerangka teori institusional dari DiMaggio dan Powell (1983)

membantu menjelaskan dinamika ini. Mereka menegaskan bahwa organisasi beroperasi dalam “medan institusional” yang dipenuhi tekanan normatif, regulatif, dan kultural-kognitif. Dalam konteks UPZ, tekanan regulatif hadir melalui kebijakan nasional tentang pengelolaan zakat dan regulasi kampus. Namun tekanan normatif dan kultural-kognitif, yakni sejauh mana zakat dipahami sebagai bagian integral dari identitas akademik dan religius kampus, belum sepenuhnya terinternalisasi.

Temuan menunjukkan bahwa legitimasi UPZ cenderung menguat ketika didukung oleh kebijakan formal kampus, misalnya melalui edaran rektor atau integrasi dalam sistem penggajian. Kebijakan semacam ini memberikan legitimasi regulatif. Namun legitimasi normatif, yakni penerimaan bahwa membayar zakat melalui UPZ adalah tindakan yang secara moral tepat dan selaras dengan nilai universitas, lebih banyak dibangun melalui komunikasi, keteladanan pimpinan, dan narasi dampak sosial program.

Selain legitimasi, struktur kepercayaan menjadi fondasi penting dalam membentuk minat. Sejalan dengan pandangan Anthony Giddens (1990), dalam masyarakat modern kepercayaan terhadap lembaga dibangun melalui sistem abstrak yang memerlukan mekanisme jaminan seperti profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam penelitian ini, transparansi laporan keuangan dan dokumentasi program menjadi faktor kunci dalam memperkuat persepsi integritas UPZ. Ketika laporan disampaikan secara terbuka dan periodik, persepsi kredibilitas meningkat, dan minat partisipasi ikut terdorong. Namun, temuan juga menunjukkan bahwa legitimasi dan trust bersifat dinamis. Ketika komunikasi kurang intensif atau laporan tidak tersosialisasi secara luas, muncul ruang ketidakpastian yang dapat menghambat partisipasi. Dalam perspektif Luhmann (1979), trust berfungsi untuk mengurangi kompleksitas sosial. Jika kompleksitas tidak dikelola melalui informasi yang memadai, individu cenderung kembali pada pola lama yang dianggap lebih aman, seperti menyalurkan zakat secara langsung.

Menariknya, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa legitimasi UPZ diperkuat ketika program-programnya terhubung secara langsung dengan isu-isu sosial di sekitar kampus, seperti beasiswa mahasiswa kurang mampu atau bantuan masyarakat sekitar. Dalam situasi tersebut, UPZ tidak lagi dipersepsikan sebagai unit administratif, tetapi sebagai instrumen keadilan sosial yang konkret. Di sinilah legitimasi moral dan simbolik terbentuk.

Dengan demikian, institusi UPZ dapat dipahami sebagai arena di mana legitimasi regulatif, normatif, dan kultural-kognitif saling berinteraksi. Partisipasi civitas akademika bukan sekadar hasil kepatuhan terhadap regulasi, melainkan hasil dari keberhasilan institusi

membangun kesesuaian antara nilai agama, identitas kampus Islam, dan praktik manajerial yang profesional.

Kontribusi teoretik penelitian ini terletak pada penguatan perspektif institusional dalam studi perilaku zakat. Jika sebagian besar penelitian zakat menekankan variabel individual seperti religiositas, sikap, dan pendapatan, maka penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi institusional, khususnya legitimasi dan trust, memainkan peran sentral dalam mengarahkan pilihan kanal pembayaran zakat. Dengan demikian, studi ini menggeser fokus dari sekadar “mengapa individu membayar zakat” menjadi “bagaimana institusi membentuk kondisi sosial yang memungkinkan minat tersebut tumbuh dan berkelanjutan”. Dalam konteks kampus Islam seperti UIN, implikasinya jelas: penguatan partisipasi zakat melalui UPZ tidak cukup dilakukan melalui imbauan normatif atau regulasi administratif. Penguatan partisipasi memerlukan strategi institusional yang mampu membangun legitimasi simbolik dan struktur kepercayaan yang kokoh. Hanya dengan demikian, UPZ dapat bertransformasi dari unit administratif menjadi institusi sosial yang diakui secara moral dan kultural oleh civitas akademika.

3. Interaksi Sosial dan Dinamika Kolektif sebagai Jejaring Sosial

Jika pada dimensi psikologis minat dipahami sebagai proses makna individual dan pada dimensi kelembagaan sebagai hasil konstruksi legitimasi institusional, maka dimensi interaksi dan dinamika memperlihatkan bahwa minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ pada akhirnya beroperasi dalam jejaring interaksi sosial yang hidup. Minat bukan hanya dibentuk oleh sikap personal atau struktur kelembagaan, tetapi juga oleh dinamika kolektif yang berlangsung dalam komunitas kampus.

Dalam perspektif sosiologi tindakan, Max Weber menegaskan bahwa tindakan sosial selalu berorientasi pada orang lain dan dibentuk oleh pemaknaan intersubjektif. Keputusan membayar zakat melalui UPZ tidak pernah sepenuhnya privat, keputusan itu berada dalam medan sosial yang dipenuhi relasi, percakapan, dan referensi kolektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa percakapan informal, baik dalam forum rapat, grup media sosial, maupun diskusi antar kolega, memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi terhadap UPZ. Fenomena ini sejalan dengan teori konstruksi sosial realitas yang dikembangkan oleh Berger dan Luckmann (1966). Realitas sosial, termasuk persepsi tentang legitimasi dan kredibilitas UPZ, dibangun melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Ketika narasi positif tentang transparansi dan dampak program UPZ berulang kali dikomunikasikan dalam ruang sosial kampus, narasi tersebut mengalami objektivasi,

diterima sebagai fakta sosial yang “wajar”. Sebaliknya, jika komunikasi minim atau ambigu, realitas sosial yang terbentuk pun menjadi lemah dan rentan terhadap keraguan.

Temuan penelitian juga memperlihatkan pentingnya norma kolektif dalam mendorong partisipasi. Dalam kerangka Theory of Planned Behavior dari Icek Ajzen, norma subjektif dipahami sebagai persepsi individu terhadap tekanan sosial untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku. Namun, dalam konteks kampus, norma tersebut tidak hadir sebagai tekanan eksplisit, melainkan sebagai atmosfer kultural yang terbentuk melalui keteladanan pimpinan dan budaya unit kerja. Ketika pimpinan fakultas atau kepala unit secara terbuka menyatakan komitmennya pada UPZ, tindakan tersebut menciptakan efek legitimasi sosial. Dalam teori modal sosial yang dikemukakan oleh Putnam (2000), partisipasi kolektif diperkuat oleh jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi dan kerja sama. UPZ yang berhasil menanamkan dirinya dalam jaringan sosial kampus akan memperoleh dukungan yang lebih stabil dibandingkan yang hanya mengandalkan mekanisme administratif.

Selain itu, dinamika generasional memperlihatkan bagaimana perubahan pola interaksi mempengaruhi minat. Generasi yang lebih muda cenderung membangun kepercayaan melalui kanal digital dan komunikasi visual, sedangkan generasi senior lebih mengandalkan relasi personal dan reputasi jangka panjang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa dinamika kolektif tidak bersifat homogen, dinamika kolektif dipengaruhi oleh habitus sosial yang berbeda sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu. Habitus membentuk cara individu merespons institusi, termasuk dalam memilih saluran pembayaran zakat.

Temuan lain yang signifikan adalah peran pengalaman kolektif dalam memperkuat komitmen. Keterlibatan langsung dalam distribusi zakat atau menyaksikan dampaknya secara konkret menciptakan apa yang dapat disebut sebagai “emosi kolektif solidaritas”. Dalam perspektif Émile Durkheim, solidaritas sosial terbentuk melalui kesadaran kolektif yang memperkuat ikatan moral antar anggota komunitas. Ketika zakat dipahami sebagai praktik solidaritas kampus, minat untuk berpartisipasi meningkat karena individu merasa menjadi bagian dari misi bersama. Dengan demikian, interaksi sosial berfungsi sebagai ruang produksi makna dan legitimasi yang melampaui dimensi individual dan institusional. Minat terhadap UPZ berkembang dalam ekosistem sosial yang mencakup komunikasi, keteladanan, pengalaman bersama, dan jaringan kepercayaan. Tanpa dinamika kolektif yang mendukung, minat akan tetap bersifat sporadis dan individualistik.

Kontribusi teoretik dimensi interaksi dan dinamika terletak pada penegasan bahwa studi perilaku zakat perlu memasukkan dimensi relasional dan kolektif. Jika TPB menjelaskan

minat dari perspektif psikologis, dan teori institusional menekankan legitimasi struktural, maka penelitian ini menunjukkan bahwa interaksi sosial adalah jembatan yang menghubungkan keduanya. Minat tidak hanya lahir dari sikap dan regulasi, tetapi dari jaringan sosial yang memediasi pengalaman dan makna. Dalam konteks UPZ kampus, implikasinya jelas, yaitu strategi peningkatan partisipasi tidak cukup berbasis regulasi atau kampanye normatif. Peningkatan partisipasi memerlukan pembangunan ekosistem sosial yang partisipatif, melalui forum dialog, keterlibatan program, narasi dampak, dan kepemimpinan simbolik, yang memungkinkan minat tumbuh sebagai kesadaran kolektif, bukan sekadar keputusan individual.

F. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dinamika minat civitas akademika terhadap pembayaran zakat melalui UPZ di UIN Sunan Kalijaga tidak dapat dipahami secara reduksionistik sebagai persoalan kesadaran religius atau kepatuhan normatif semata. Minat merupakan hasil dari proses yang berlapis. Minat dibentuk melalui konstruksi makna individual, dilegitimasi dalam struktur institusional, dan diproduksi ulang melalui interaksi sosial yang berlangsung secara kolektif.

Pada level individual, minat terbukti tidak sekadar variabel psikologis sebagaimana dijelaskan dalam Theory of Planned Behavior oleh Icek Ajzen. Religiusitas yang tinggi memang mendorong kesadaran kewajiban zakat, tetapi tidak secara otomatis meningkatkan partisipasi kelembagaan. Pilihan membayar zakat melalui UPZ dipengaruhi oleh bagaimana individu memaknai lembaga tersebut dalam relasinya dengan identitas religius dan sosialnya. Trust menjadi faktor kunci, dan trust itu sendiri merupakan konstruk sosial yang dibangun melalui pengalaman, legitimasi moral, dan persepsi transparansi.

Pada level institusional, UPZ berfungsi sebagai arena legitimasi. Keberadaannya sebagai unit resmi belum cukup untuk memastikan partisipasi tinggi apabila legitimasi normatif dan kultural belum terinternalisasi. Mengacu pada teori legitimasi dari Mark Suchman dan teori institusional dari Paul DiMaggio serta Walter W. Powell, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi zakat melalui UPZ tumbuh ketika terdapat kesesuaian antara regulasi formal, nilai moral kampus, dan praktik manajerial yang transparan. Legitimasi regulatif perlu diperkuat dengan legitimasi normatif dan simbolik agar trust berkembang secara berkelanjutan.

Pada level interaksi sosial, minat terbukti bersifat relasional dan kolektif. Minat dipengaruhi oleh komunikasi informal, keteladanan pimpinan, budaya unit kerja, dan pengalaman bersama dalam program distribusi zakat. Sejalan dengan perspektif konstruksi

sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, realitas tentang kredibilitas UPZ dibentuk melalui proses komunikasi yang berulang. Dalam konteks ini, jaringan sosial dan modal sosial sebagaimana dipahami oleh Robert D. Putnam memainkan peran penting dalam memperkuat norma kolektif dan solidaritas kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211.
- Alam, S. S., Mohd, R., & Hisham, B. (2012). Is religiosity an important factor in influencing the intention to undertake Islamic home financing in Klang Valley? *World Applied Sciences Journal*, 19(7), 1030–1041.
- Ascarya. (2018). The role of Islamic social finance during economic downturn. *Islamic Economic Studies*, 26(2), 85–108.
- BAZNAS. (2023). *Outlook Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. Anchor Books.
- Blumer, H. (1969). *Symbolic interactionism: Perspective and method*. University of California Press.
- Bourdieu, P. (1990). *The logic of practice*. Stanford University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American Sociological Review*, 48(2), 147–160.
- Durkheim, É. (1997). *The division of labor in society* (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Original work published 1893)
- Giddens, A. (1990). *The consequences of modernity*. Stanford University Press.
- Hassan, R., & Noor, A. (2015). Trust and zakat institutions: Enhancing compliance. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2017). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzaki's intention to pay zakah. *International Journal of Zakat*, 2(2), 73–92.
- Kahf, M. (1999). The performance of the institution of zakat in theory and practice.
- Kasri, R. A. (2013). Giving behaviors in Indonesia: Motives and marketing implications for Islamic charities. *Journal of Islamic Marketing*, 4(3), 306–324.
- Kasri, R. A., & Yuniar, A. (2015). Determinants of zakat compliance behavior among Muslims: A survey in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 6(1), 19–34.

- Kasri, R. A., & Yuniar, A. (2021). Determinants of zakat compliance behavior: A study of Indonesia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(1), 1–19.
- Latief, H. (2013). Islamic philanthropy and the private sector in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 3(2), 175–201.
- Luhmann, N. (1979). *Trust and power*. John Wiley & Sons.
- Mukhlis, A., & Beik, I. S. (2013). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar zakat: Studi kasus Kabupaten Bogor. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 1(1), 83–106.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Saad, R. A. J., & Haniffa, R. (2014). Determinants of zakat (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 182–193.
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and organizations: Ideas, interests, and identities* (4th ed.). Sage Publications.
- Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review*, 20(3), 571–610.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press.